

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Keempat, UII Press, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2018, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murya, Adnan dan Urip Sucipto, 2019, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2013, *Kode Etik Hakim*, Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suseno, Franz Magnis, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, PT Kanisius, Yogyakarta.

Thalib, Hambali, 2011, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lain

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukkan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2344.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta. Tamahan Lembaran Negara Nomor 2384.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2017.

Anggaran Dasar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2018.

3. Internet

Anonim, "Daftar Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Boyolali",
Website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional, <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*”, *Arti Kata Tanggung Jawab*, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

Anonim, “Profil *Star of Service, Startup* dari Perancis yang Ekspansi ke Indonesia”, *Onlinepedia.com*, <https://www.onlenpedia.com/2015/11/pr-ofil-star-of-service-startup-dari.html>, diakses pada tanggal 24 November 2020.

Anonim, “Pekerjakan Notaris Terbaik di Boyolali”, *Website Star Of Service*, <https://www.starofservice.co.id/dir/central-java/boyolali/boyolali/layanan-notaris>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

Febrinastri, Fabiola, “Menteri ATR/BPN: Pejabat PPAT Jangan Melanggar Kode Etik”, *Website Suara.com*, <https://www.suara.com/news/2017/12/14/1300/menteri-atrbpn-kita-harus-terus-cegah-sengketa-tanah>, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

4. Tesis

Alex, Jean Art Anggreani, “Pengawasan Majelis Kehormatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Kabupaten Sleman”, *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Ningsih, Ariyaini Wahyu, “Implementasi Penerapan Sanksi Berkaitan Dengan Pelanggaran Jabatan Dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kota Palangkaraya”, *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.